

# Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 3

1.4 Sistematika Penulisan ..... 4

BAB II ..... 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 5

TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan 2 Tahun 2024 ..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 26

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 31

BAB III..... 32

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD..... 32

BAB IV ..... 47

PENUTUP..... 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Kinerja Sampai pada Triwulan 2 Tahun 2024 .....6

Tabel 2. Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan mendukung Penanggulangan Kemiskinan  
Dinas P3AKB Provsu..... 24

Tabel 3. Capaian IKU Dinas P3AKB Provsu .....26

Tabel 4. Indikator Kinerja Dinas P3AKB Provsu .....28

Tabel 5. Capaian Kinerja IKU hingga Triwulan 2 Tahun 2024 .....29

Tabel 6. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Hingga Triwulan 2 Tahun 2024.....30

Tabel 7. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024..... 33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 – 2024 telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salahsatu arahan pembangunan nasional memiliki tantangan pada perwujudan pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dimana salah satunya dilaksanakan melalui strategi meningkatkan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan sasaran peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 1 (satu) tahun kedepan. Rancangan Renja Perubahan ini merupakan agenda pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. Renstra ini merupakan arah pembangunan ingin dicapai oleh Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun rencana pembangunan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah tahapan awal menyusun dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 360 ayat 2 Permendagri 86 tahun Tahun 2017 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas P3AKB Provsu sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Perumusan Rancangan Perubahan Renja OPD mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan OPD;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja; OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  20. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
  21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.7/4868/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Tahun 2024 adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024;

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
6. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;
7. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja dan kebijakan pengawasan internal;
8. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (tahun berjalan);
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

#### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TRIWULAN II TAHUN 2024**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan 2 Tahun 2024**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tetap mengacu pada pencapaian indikator program pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.807.874.025,- yang keseluruhannya merupakan belanja operasi yang diperuntukkan bagi kegiatan teknis, kegiatan pendukung dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah dengan intervensi sebanyak 10 program, 25 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan capaian kinerja hingga triwulan 2 sebagai berikut :



Tabel 1.  
Realisasi Kinerja Sampai pada Triwulan 2 Tahun 2024

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024 |                  | REALISASI KINERJA PADA |                 | REALISASI KINERJA PADA |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                                        |                                                         |                                                                               |                  | TW I                   |                 | TW 2                   |                 |                                                                               |                 |
|       |                                                                        |                                                         | K                                                                             | Rp.              | K                      | Rp.             | K                      | Rp.             | K                                                                             | Rp.             |
|       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                         |                                                                               | 18.676.760.019   | 10%                    | 2.580.768.636   | 40%                    | 3.880.371.983   | 49%                                                                           | 6.451.365.619   |
| I     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                           | Persentase dukungan kinerja tersedia                    | 100%                                                                          | Rp16.366.486.793 | 10%                    | Rp2.559.566.810 | 40%                    | Rp3.819.463.060 | 49%                                                                           | Rp6.379.029.870 |
| I.1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Persentase dokumen perencanaan tersedia                 | 100%                                                                          | Rp100.545.000    | 0%                     | Rp0             | 36%                    | Rp71.770.000    | 36,4%                                                                         | Rp71.770.000    |
| I.1.1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | 11                                                                            | 100.545.000      |                        |                 | 4                      | 71.770.000      | 4                                                                             | 71.770.000      |
| I.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | 0                                                                             | -                |                        |                 |                        |                 | 0                                                                             | -               |
| I.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase dukungan administrasi keuangan tersedia      | 100%                                                                          | Rp13.270.811.270 | 24%                    | Rp2.185.919.047 | 24%                    | Rp3.072.936.703 | 48,0%                                                                         | Rp5.258.855.750 |
| I.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN                | 13                                                                            | Rp13.065.221.270 | 3                      | 2.167.919.047   | 3                      | 3.023.266.703   | 6                                                                             | 5.191.185.750   |

|       |                                                                  |                                                                                     |             |                      |             |                     |               |                      |              |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| I.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 12          | Rp205.590.000        | 3           | 18.000.000          | 3             | 49.670.000           | 6            | 67.670.000           |
| I.3   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase dukungan peningkatan kapasitas SDM tersedia</b>                       | <b>100%</b> | <b>Rp176.900.000</b> | <b>0%</b>   | <b>Rp0</b>          | <b>99%</b>    | <b>Rp56.320.000</b>  | <b>98,6%</b> | <b>Rp56.320.000</b>  |
| I.3.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1           | Rp118.750.000        |             |                     |               |                      | 0            | -                    |
| I.3.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 68          | Rp58.150.000         |             |                     | 68            | 56.320.000           | 68           | 56.320.000           |
| I.4   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase dukungan administrasi umum tersedia</b>                               | <b>100%</b> | <b>Rp58.955.852</b>  | <b>1,5%</b> | <b>Rp75.668.780</b> | <b>40,1 %</b> | <b>Rp154.271.680</b> | <b>41,5%</b> | <b>Rp229.940.460</b> |
| I.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 2           | Rp20.725.552         |             |                     | 1             | 13.756.450           | 1            | 13.756.450           |
| I.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 8           | 137.281.503          |             |                     |               |                      | 0            | -                    |
| I.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 4           | 347.971.663          |             |                     | 1             | 12.380.000           | 1            | 12.380.000           |
| I.4.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 4           | Rp31.982.300         |             |                     | 1             | 2.690.000            | 1            | 2.690.000            |

|            |                                                                                                                    |                                                                                                           |             |                        |            |                      |            |                      |              |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| I.4.5      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                              | 960         | Rp6.248.000            |            |                      | 400        | 820.000              | 400          | 820.000              |
| I.4.6      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 300         | 717.941.050            | 19         | 75.668.780           | 109        | 124.625.230          | 128          | 200.294.010          |
| <b>I.5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase dukungan penunjang urusam pemerintahan tersedia</b>                                         | <b>100%</b> | <b>Rp2.116.946.188</b> | <b>21%</b> | <b>Rp272.094.263</b> | <b>29%</b> | <b>Rp429.147.138</b> | <b>50,0%</b> | <b>Rp701.241.401</b> |
| I.5.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 4           | 2.529.500              |            |                      | 2          | 1.373.000            | 2            | 1.373.000            |
| I.5.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12          | Rp474.400.000          | 3          | 46.577.795           | 3          | 114.407.560          | 6            | 160.985.355          |
| I.5.3      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12          | Rp1.642.546.188        | 3          | 225.516.468          | 3          | 313.366.578          | 6            | 538.883.046          |
| <b>I.6</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase ketersediaan pemeliharaan BMD</b>                                                           | <b>100%</b> | <b>Rp642.328.483</b>   | <b>11%</b> | <b>Rp25.884.720</b>  | <b>11%</b> | <b>Rp35.017.539</b>  | <b>21,4%</b> | <b>Rp60.902.259</b>  |
| I.6.1      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12          | Rp460.944.483          | 3          | 25.884.720           | 3          | 35.017.539           | 6            | 60.902.259           |

|        |                                                                                               |                                                                                                          |             |                    |  |          |  |          |   |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|----------|--|----------|---|----------|
| I.6.2  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 6           | Rp126.944.000      |  |          |  |          | 0 | -        |
| I.6.3  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10          | Rp54.440.000       |  |          |  |          | 0 | -        |
| II     | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                              | <b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>                                                                  |             | <b>228.879.000</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |   | <b>0</b> |
| II.1   | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>    | <b>Persentase Perangkat Daerah Responsive Gender</b>                                                     |             | <b>126.187.000</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |   | <b>0</b> |
| II.1.1 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                  | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                                                 | 2 Kebijakan | Rp84.635.000       |  |          |  | -        | 0 | -        |
| II.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi           | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi                    |             |                    |  |          |  |          | 0 | -        |
| II.1.1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi         | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG      | 42 OPD      | Rp41.552.000       |  |          |  |          | 0 | -        |

|        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |              |  |     |  |     |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|-----|--|-----|---|-----|
| II.2   | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi                | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi                                                                                      |            | Rp54.542.000 |  | Rp0 |  | Rp0 |   | Rp0 |
| II.2.1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 10 Lembaga | Rp54.542.000 |  |     |  |     | 0 | -   |
| II.3   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                   |            | Rp48.150.000 |  | Rp0 |  | Rp0 |   | Rp0 |
| II.3.1 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi                                                            | 80 Orang   | Rp48.150.000 |  |     |  |     | 0 | -   |
| II.3.2 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi                                                                                                                              | -          | -            |  |     |  |     | 0 | -   |

|         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |  |     |   |     |   |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--|-----|---|-----|---|-----|
| III     | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                                                                                                                     | Rasio Kekerasan<br>terhadap Perempuan<br>(per 100.000<br>penduduk<br>Perempuan                                                                                                      |                  | Rp407.957.200 |  | Rp0 |   | Rp0 |   | Rp0 |
| III.1   | Pencegahan<br>Kekerasan terhadap<br>Perempuan yang<br>melibatkan para<br>Pihak Lingkup<br>Daerah Provinsi dan<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota         | Jumlah Perangkat<br>Daerah/ lembaga<br>yang melaksanakan<br>pencegahan<br>kekerasan terhadap<br>perempuan                                                                           |                  | Rp50.847.500  |  | Rp0 |   | Rp0 |   | Rp0 |
| III.1.1 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan, Program<br>dan Kegiatan<br>Pencegahan Kekerasan<br>terhadap Perempuan<br>Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan, Program<br>dan Kegiatan<br>Pencegahan<br>Kekerasan terhadap<br>Perempuan<br>Kewenangan Provinsi | 2<br>Dokum<br>en | Rp50.847.500  |  |     |   |     | 0 | -   |
| III.2   | Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan<br>Perlindungan<br>Perempuan<br>Kewenangan<br>Provinsi                                      | Jumlah lembaga<br>penyedia layanan<br>perlindungan<br>perempuan yang<br>ditingkatkan<br>kapasitasnya                                                                                |                  | Rp357.109.700 |  | Rp0 |   | Rp0 |   | Rp0 |
| III.2.1 | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Penanganan bagi<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan<br>Kewenangan<br>Provinsi           | Jumlah Sumberdaya<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan Penanganan<br>bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Kewenangan Provinsi<br>yang Mendapat<br>Peningkatan Kapasitas                  | 20<br>Orang      | Rp34.508.750  |  |     | 0 | -   | 0 | -   |

|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |           |                     |   |            |   |            |   |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| III.2.2 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                        | 500 Orang | Rp188.977.050       |   |            |   |            | 0 | -          |
| III.2.3 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota          | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Rp133.623.900       |   |            |   |            | 0 | -          |
| IV      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                           | <b>Indeks Kualitas Keluarga</b>                                                                                                                    |           | <b>Rp84.952.506</b> |   | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| IV.1    | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                          | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak</b>                                  |           | <b>Rp84.952.506</b> |   | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| IV.1.1  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                      | 2 Dokumen | Rp84.952.506        |   |            | 0 | -          | 0 | -          |
| IV.2    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                    | -         | -                   | - | -          | - | -          | - | -          |

|        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |           |                     |   |            |   |            |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|------------|---|------------|------------|
| IV.2.1 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                       | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                   | -         | -                   |   |            |   | 0          | -          |
| IV.3   | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                    | -         | -                   | - | -          | - | -          | -          |
| IV.3.1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | -         | -                   |   |            |   | 0          | -          |
| V      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                                             | <b>Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak</b>                                                                                          |           | <b>Rp67.312.000</b> |   | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> | <b>Rp0</b> |
| V.1    | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                       | <b>Tersedianya Data Gender dan Anak yang valid</b>                                                                                                                 |           | <b>Rp67.312.000</b> |   | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> | <b>Rp0</b> |
| V.1.1  | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                         | 3 Dokumen | Rp24.382.000        |   |            |   | 0          | -          |



|        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                     |                      |  |            |  |            |   |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--|------------|--|------------|---|------------|
| V.1.2  | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                            | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                      | 2 Dokumen           | Rp42.930.000         |  |            |  |            | 0 | -          |
| VI     | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                   | <b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>                                                                                                                            |                     | <b>Rp348.973.000</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| VI.1   | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                       | <b>Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pelembagaan PHA</b>                                                          |                     | <b>Rp147.622.000</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| VI.1.1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 25 Perangkat Daerah | Rp147.622.000        |  |            |  |            | 0 | -          |
| VI.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                | -                   | -                    |  |            |  |            | 0 | -          |
| VI.2   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                            | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan</b>                                                                  |                     | <b>Rp201.351.000</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |

|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |            |                     |  |            |  |            |   |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|---|------------|
| VI.2.1  | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                 | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                          | 500 Orang  | Rp161.629.000       |  |            |  |            | 0 | -          |
| VI.2.2  | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 2 Kegiatan | Rp39.722.000        |  |            |  |            | 0 | -          |
| VI.2.3  | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                               | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi     | -          | -                   |  |            |  |            | 0 | -          |
| VI.2.4  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                      | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                            | -          | -                   |  |            |  |            | 0 | -          |
| VII     | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                | <b>Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 100.000 penduduk Anak)</b>                                                                  |            | <b>Rp85.163.750</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| VII.1   | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>          | <b>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap Anak</b>                                 |            | <b>Rp50.655.000</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| VII.1.1 | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah                                                                                             | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan                                                                              | -          | -                   |  |            |  |            | 0 | -          |

|         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |           |                     |  |            |  |            |   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--|------------|--|------------|---|------------|
|         | dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                                                                   | dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                         |           |                     |  |            |  |            |   |            |
| VII.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                   | 1 Dokumen | Rp50.655.000        |  |            |  |            | 0 | -          |
| VII.2   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                |           | <b>Rp34.508.750</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| VII.2.1 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                      | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                         | -         | -                   |  |            |  |            | 0 | -          |
| VII.2.2 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                          | -         | -                   |  |            |  |            | 0 | -          |
| VII.2.3 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan                                                               | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | 20 Orang  | Rp34.508.750        |  |            |  |            | 0 | -          |

|          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |           |                      |  |            |  |            |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|------------|--|------------|------------|
| VII.2.4  | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                       | -         | -                    |  |            |  | 0          | -          |
| VIII     | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                             | <b>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</b>                                                                                                                       |           | <b>Rp230.426.550</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> | <b>Rp0</b> |
| VIII.1   | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>                       | <b>Indeks Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                      |           | <b>Rp185.401.000</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> | <b>Rp0</b> |
| VIII.1.1 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | 5 Laporan | Rp94.600.000         |  |            |  | 0          | -          |
| VIII.2   | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                         | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                        | 2 Dokumen | Rp33.000.000         |  |            |  | 0          | -          |
| VIII.3   | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga                                             | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program                                                           | 2 Daerah  | Rp57.801.000         |  |            |  | 0          | -          |

|          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |           |                      |  |            |  |            |  |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|------------|--|------------|--|------------|
|          | Kencana dan Sektor Lain                                                                               | Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain                                                                                                           |           |                      |  |            |  |            |  |            |
| VIII.2   | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>                               | <b>Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk</b>                                                                                                                                        |           | <b>Rp45.025.550</b>  |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |
| VIII.2.1 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                            | 1 Dokumen | Rp45.025.550         |  |            |  | 0          |  | -          |
| VIII.2.2 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)          | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                                       | -         | -                    |  |            |  | 0          |  | -          |
| VIII.2.3 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga                          | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | -         | -                    |  |            |  | 0          |  | -          |
| IX       | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                      | <b>Prevalensi Kontrasepsi modern (mCPR)</b>                                                                                                                                                           |           | <b>Rp245.061.200</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |

|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |          |               |  |     |  |     |  |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--|-----|--|-----|--|-----|
| IX.1   | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah stakeholder dan mitra yang berperan aktif dalam Program Bangga Kencana                                                                                                                    |          | Rp138.401.200 |  | Rp0 |  | Rp0 |  | Rp0 |
| IX.1.1 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                            | -        | -             |  |     |  | 0   |  | -   |
| IX.1.2 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                                              | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 7 Daerah | Rp17.775.200  |  |     |  | 0   |  | -   |
| IX.1.3 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                    | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana             | -        | -             |  |     |  | 0   |  | -   |

|        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |          |                    |  |          |  |          |   |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|----------|--|----------|---|----------|
|        |                                                                                                                                                                  | (Bangga Kencana)<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal                                                                                                                                   |          |                    |  |          |  |          |   |          |
| IX.1.4 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                      | 3 Daerah | Rp120.626.000      |  |          |  |          | 0 | -        |
| IX.2   | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>     | <b>Jumlah organisasi masyarakat yang dibina dan berperan aktif dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                                         |          | <b>106.660.000</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |   | <b>0</b> |
| IX.2.1 | Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | -        | -                  |  |          |  |          | 0 | -        |
| IX.2.2 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB                                      | -        | -                  |  |          |  |          | 0 | -        |

|        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |               |                      |  |            |  |            |   |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|------------|--|------------|---|------------|
| IX.2.3 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 25 Organisasi | Rp106.660.000        |  |            |  |            | 0 | -          |
| X      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                       | <b>Angka Kelahiran pada Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)</b>                                                                                                                |               | <b>Rp127.038.000</b> |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| X.1    | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>Jumlah organisasi dan kelompok keluarga yang memperoleh pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                            |               | <b>Rp82.350.000</b>  |  | <b>Rp0</b> |  | <b>Rp0</b> |   | <b>Rp0</b> |
| X.1.1  | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                           | Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                              | -             | -                    |  |            |  |            | 0 | -          |
| X.1.2  | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                           | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                               | 3 Dokumen     | Rp39.670.000         |  |            |  |            | 0 | -          |
| X.1.3  | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                               | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                          | 3 Kelompok    | Rp42.680.000         |  |            |  |            | 0 | -          |



|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |           |                      |  |                     |  |                     |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| X.1.4 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                                                                              | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | -         | -                    |  |                     |  | 0                   | -                   |
| X.2   | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>    |           | <b>Rp44.688.000</b>  |  | <b>Rp0</b>          |  | <b>Rp0</b>          | <b>Rp0</b>          |
| X.2.1 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)      | 1 Dokumen | Rp15.081.000         |  |                     |  | 0                   | -                   |
| X.2.2 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                            | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                     | 2 Laporan | Rp29.607.000         |  |                     |  | 0                   | -                   |
|       | <b>UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>                                                                                                                                         |                                                                                                            |           | <b>Rp484.510.020</b> |  | <b>Rp21.201.826</b> |  | <b>Rp60.908.923</b> | <b>Rp72.335.749</b> |
|       | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                                                               | <b>Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk Perempuan)</b>                                 |           | <b>Rp366.770.020</b> |  | <b>Rp21.201.826</b> |  | <b>Rp51.133.923</b> | <b>Rp72.335.749</b> |

|  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |            |                      |    |                     |    |                     |    |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|
|  | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan</b>                                                            |            | <b>Rp366.770.020</b> |    | <b>Rp21.201.826</b> |    | <b>Rp51.133.923</b> |    | <b>Rp72.335.749</b> |
|  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 360 Orang  | Rp249.030.020        | 15 | 21.201.826          | 60 | 51.133.923          | 75 | 72.335.749          |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi   | 70 Layanan | Rp117.740.000        |    |                     |    |                     | 0  | -                   |
|  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                        | <b>Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 100.000 penduduk Anak)</b>                                                                         |            | <b>Rp117.740.000</b> |    | <b>Rp0</b>          |    | <b>Rp9.775.000</b>  |    | <b>Rp0</b>          |
|  | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                     | <b>Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan kewenangan Provinsi</b>                                                                    |            | <b>Rp117.740.000</b> |    | <b>Rp0</b>          |    | <b>Rp9.775.000</b>  |    | <b>Rp0</b>          |
|  | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                        | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi                                                                                 | 200 Orang  | Rp117.740.000        |    |                     | 60 | 9.775.000           | 0  | -                   |

Tabel 2.  
Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan mendukung Penanggulangan Kemiskinan Dinas P3AKB Provsu

| No | Program                                                   | Subkegiatan                                                                                                                        | Alokasi Anggaran 2024 (Rp) | Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)                                                         | Realisasi Hingga TW 2 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 123.890.000,00             | G. Sitoli, Deli Serdang, Batubara, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Karo | -                     |
| 2  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | 117.740.000,00             | Provinsi Sumatera Utara                                                                    | 75 korban             |
|    |                                                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi    | 265.030.020,00             |                                                                                            | -                     |
| 3  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                     | 42.930.000,00              | Deli Serdang dan Medan                                                                     | -                     |
| 4  |                                                           | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                           | 24.382.000,00              | Deli Serdang dan Medan                                                                     | -                     |

|   |                                                                          |                                                                                                           |                |                                               |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---|
| 5 | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                                     | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | 188.977.050,00 | Provinsi Sumatera Utara                       | - |
| 7 | PROGRAM<br>PEMENUHAN HAK<br>ANAK                                         | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                    | 228.229.000,00 | Medan                                         | - |
| 8 | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN DAN<br>PENINGKATAN<br>KELUARGA<br>SEJAHTERA (KS) | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                           | 43.020.000,00  | Deli Serdang, Serdang<br>Bedagai, Binjai      | - |
| 9 | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN DAN<br>PENINGKATAN<br>KELUARGA<br>SEJAHTERA (KS) | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                               | 42.680.000,00  | Dairi, Labuhanbatu,<br>Padang Sidempuan, Karo | - |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah berupa capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Sebagai representasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara maka pada tahun 2024, maka disusunlah beberapa Indikator Kinerja yaitu :

- 1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG;
- 2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak;
- 4. Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi;
- 5. TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total).

Hingga triwulan 2 tahun 2024, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.  
Capaian IKU Dinas P3AKB Provsu

| No. | Aspek/Fokus/Bidang/<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah (IKU PD/IKK)            | Satuan   | 2023<br>BASELINE | 2024   |      |           |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|------|-----------|------|
|     |                                                                                                  |          |                  | TARGET |      | REALISASI |      |
|     |                                                                                                  |          |                  | RPD    | RKPD | TW 1      | TW 2 |
| 2   | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                 |          |                  |        |      |           |      |
| 2.1 | Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi | Persen   | 19               | 36     | 36   | 0         | 29   |
| 2.2 | Rasio kekerasan terhadap Perempuan                                                               | /100.000 | 12               | 9      | 9    | 2         | 3    |
| 2.3 | Rasio kekerasan terhadap Anak                                                                    | /100.000 | 29               | 16     | 16   | 5         | 15   |
| 2.4 | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi                                   | Persen   | 38               | 86     | 86   | 31        | 77   |

|     |                                                   |        |      |      |      |       |       |
|-----|---------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-------|
| 2.5 | TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | Persen | 2,39 | 2,42 | 2,42 | 2,39* | 2,39* |
|-----|---------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-------|

Pada Indikator Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi, dari target sebesar 36 persen (15 perangkat daerah dari total 42 perangkat daerah), memiliki realisasi kinerja hingga triwulan 2 sebesar 29 persen (12 perangkat daerah dari total 42 perangkat daerah). Kondisi ini memperlihatkan hasil yang baik dan akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2024.

Pada indikator Rasio kekerasan terhadap Perempuan, yang memiliki target dari 100.000 penduduk perempuan sebanyak 9 orang kekerasan, hingga triwulan 2 telah memiliki realisasi dari 100.000 penduduk perempuan sebanyak 3 orang mengalami kekerasan. Begitu juga dengan indikator Rasio Kekerasan Terhadap Anak, dengan target dari 100.000 penduduk usia anak, sebanyak 16 orang penduduk usia anak mengalami kekerasan, hingga triwulan 2 telah memiliki capaian dari 100.000 penduduk usia anak sebanyak 15 orang anak mengalami kekerasan. Hal ini mengindikasikan adanya capaian positif dari upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara, dan akan terus dioptimalkan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara hingga akhir tahun 2024.

Untuk indikator Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 86 persen (sebanyak 23 perangkat daerah dari 26 perangkat daerah hasil pemetaan potensi), hingga triwulan 2 tahun 2024 telah mencapai target sebesar 77 persen (20 perangkat daerah dari 26 perangkat daerah hasil pemetaan potensi). Ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Perangkat Daerahnya telah berupaya untuk terus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

Indikator TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) pada tahun 2024 memiliki target sebesar 2,42 poin (2 – 3 anak), hingga triwulan 2 tahun 2024 telah mencapai target sebesar 2,39 poin, terjadi penurunan sebesar 0,03 point sehingga hal ini mengindikasikan bahwa jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya mengalami penurunan dan ini adalah capaian yang positif namun perlu ditekan karena angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang, idealnya ada di kisaran 2,1 dimana angka kelahiran 2,1 ini menunjukkan bahwa tiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pembangunan daerah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta perwujudan keseimbangan penduduk dan keluarga yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara 3 (tiga) tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, harus dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas P3AKB ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.  
Indikator Kinerja Dinas P3AKB Provsu

| No | SASARAN STRATEGIS                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1  | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 36 %       |
| 2  | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan          | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                 | 9/100.000  |
|    |                                                                                                           | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                      | 16/100.000 |
| 3  | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak                                                | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)      | 86 %       |
| 4  | Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga                                            | Total Fertility Rate (TFR) wanita usia 15-49 tahun | 2,42       |

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B.1. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja perangkat daerah merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator kinerja pembangunan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan target tersebut bersumber dari RKPD Tahun. 2024. Capaian realisasi Indikator Kinerja Dinas P3AKB terhadap capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II mengingat tidak semua data indikator kinerja Perangkat Daerah dirilis setiap triwulanan. Berikut capaian Indikator Kinerja dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.  
Capaian Kinerja IKU hingga Triwulan 2 Tahun 2024

| NO | IKU                                                                                              | 2024     |        |      |           |      | CAPAIAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-----------|------|---------|
|    |                                                                                                  | SATUAN   | TARGET |      | REALISASI |      |         |
|    |                                                                                                  |          | RPD    | RKPD | TW 1      | TW 2 |         |
| 1  | Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi | Persen   | 36     | 36   | N/A       | 29   | 80,56   |
| 2  | Rasio kekerasan terhadap Perempuan                                                               | /100.000 | 9      | 9    | 2         | 3    | 300     |
| 3  | Rasio kekerasan terhadap Anak                                                                    | /100.000 | 16     | 16   | 5         | 15   | 106,67  |
| 4  | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi                                   | Persen   | 86     | 86   | 31        | 77   | 89,53   |
| 5  | TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)                                                | Persen   | 2,42   | 2,42 | N/A       | N/A  | N/A     |

B.2. Capaian Kinerja Program dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja program dan realisasi keuangan pada dinas P3AKB Provsu dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan, evaluasi terhadap capaian dan realisasi keuangan merupakan



langkah krusial yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebuah proses penting yang membawa banyak manfaat bagi pembangunan daerah. Sejalan dengan hal dimaksud, evaluasi terhadap kinerja program dan realisasi keuangan dilaksanakan untuk memastikan program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat menilai seberapa efektif dan efisien program telah dijalankan. Selain hal di atas, evaluasi terhadap kinerja program dan realisasi keuangan juga dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kendala permasalahan serta tantangan yang bisa saja muncul selama dalam pelaksanaannya. Untuk itu, berikut disajikan kondisi capaian kinerja program dan realisasi keuangan dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6.  
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Hingga Triwulan 2 Tahun 2024

| NO. | PERANGKAT DAERAH/PROGRAM                                     | CAPAIAN KINERJA |              | REALISASI KEUANGAN |              |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
|     |                                                              | TW I            | TW II        | TW I               | TW II        |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | 25              | 50           | 13,87              | 47,95        |
| 2   | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan    | -               | 56           | -                  | 32,18        |
| 3   | Program Perlindungan Perempuan                               | 15              | 30           | 3                  | 18,52        |
| 4   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | -               | 75           | -                  | 68           |
| 5   | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak              | -               | -            | -                  | -            |
| 6   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                             | -               | 20           | -                  | -            |
| 7   | Program Perlindungan Khusus Anak                             | -               | 35           | -                  | 21,92        |
| 8   | Program Pengendalian Penduduk                                | -               | 50           | -                  | 23,84        |
| 9   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | -               | -            | -                  | -            |
| 10  | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | -               | -            | -                  | -            |
|     | <b>Rata Rata Capaian Kinerja</b>                             | <b>20</b>       | <b>43,71</b> | <b>11,83</b>       | <b>42,77</b> |

Rata – rata capaian dari keseluruhan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana hingga triwulan 2 tahun 2024 cukup baik, dengan realisasi kinerja sebesar 45,14 persen dan realisasi keuangan mencapai 44,53 persen.

Namun demikian masih terdapat kendala dan kekurangan dalam mengoptimalkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. Terjadinya penyesuaian skenario intervensi dan target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai implikasi dari penyesuaian anggaran tahun 2024;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dalam upaya mendukung intervensi kegiatan prioritas dan strategis;
- c. Belum optimalnya upaya penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perwujudan Provinsi Layak Anak;

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan yang mungkin terjadi hingga akhir tahun 2024, adalah :

- a. Pemetaan lokasi prioritas intervensi untuk optimalisasi ketersediaan potensi anggaran;
- b. Optimalisasi koordinasi dan penguatan kerjasama lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas dan strategis;
- c. Perubahan skenario pelaksanaan kegiatan intervensi.

### **2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian terkait, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan P3AKB dan PPKB yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak;
6. Pertumbuhan penduduk seimbang dan keluarga berkualitas.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas P3AKB Sumatera Utara Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DP3AKB Sumatera Utara untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7.  
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara

| NO    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                          | INDIKATOR                                                                           | TARGET     |            | PAGU           |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|       |                                                                        |                                                                                     | SEBELUM    | SESUDAH    | SEBELUM        | SESUDAH        |
|       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                     |            |            | 19.762.225.735 | 17.767.342.020 |
| I     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | Persentase dukungan kinerja tersedia                                                | 100%       | 100%       | 17.572.210.509 | 16.459.982.244 |
| I.1   | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Persentase dokumen perencanaan tersedia                                             | 100%       | 100%       | 100.545.000    | 90.945.000     |
| I.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 10 dokumen | 10 dokumen | 100.545.000    | 90.945.000     |
| I.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase dukungan administrasi keuangan tersedia                                  | 100%       | 100%       | 13.270.811.270 | 13.001.290.281 |
| I.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 62 orang   | 60 orang   | 13.065.221.270 | 12.798.280.281 |
| I.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 12 dokumen | 12 dokumen | 205.590.000    | 203.010.000    |
| I.3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase dukungan peningkatan kapasitas SDM tersedia                              | 100%       | 100%       | 176.900.000    | 176.900.000    |
| I.3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 65 stel    | 65 stel    | 58.150.000     | 58.150.000     |
| I.3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 62 orang   | 62 orang   | 118.750.000    | 118.750.000    |

|              |                                                                              |                                                                                        |                    |                    |                      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I.4</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Persentase dukungan administrasi umum tersedia</b>                                  | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | <b>1.262.150.068</b> | <b>864.922.969</b>   |
| I.4.1        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 paket            | 1 paket            | 20.725.552           | 13.757.522           |
| I.4.2        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 8 paket            | 6 paket            | 137.281.503          | 105.591.503          |
| I.4.3        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 10 paket           | 4 paket            | 31.982.300           | 36.523.700           |
| <b>I.5</b>   | <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>              | <b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</b>    | <b>960 dokumen</b> | <b>960 dokumen</b> | <b>6.248.000</b>     | <b>4.747.000</b>     |
| I.5.1        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 500 laporan        | 350 laporan        | 717.941.050          | 587.356.050          |
| I.5.2        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 25 paket           | 6 paket            | 347.971.663          | 116.947.194          |
| <b>I.5.3</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase dukungan penunjang urusam pemerintahan tersedia</b>                      | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | <b>2.119.475.688</b> | <b>1.934.290.628</b> |
| I.5.4        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 laporan          | 1 laporan          | 2.529.500            | 2.529.500            |
| I.5.5        | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan         | 12 laporan         | 474.400.000          | 454.400.000          |
| I.5.6        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 laporan         | 12 laporan         | 1.642.546.188        | 1.477.361.128        |
| <b>I.6</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase ketersediaan pemeliharaan BMD</b>                                        | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | <b>642.328.483</b>   | <b>391.633.366</b>   |

|             |                                                                                                                   |                                                                                                          |             |             |                    |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| I.6.1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 27 unit     | 27 unit     | 460.944.483        | 242.749.366        |
| I.6.2       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 unit      | 1 unit      | 126.944.000        | 126.944.000        |
| I.6.3       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 60 unit     | 35 unit     | 54.440.000         | 21.940.000         |
| <b>II</b>   | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                  | <b>Jumlah Lembaga yang Responsif Gender</b>                                                              | <b>53</b>   | <b>53</b>   | <b>228.879.000</b> | <b>174.494.000</b> |
| <b>II.1</b> | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                        | <b>Persentase alokasi Anggaran Responsive Gender pada APBD</b>                                           | <b>9%</b>   | <b>8%</b>   | <b>126.187.000</b> | <b>116.613.000</b> |
| II.1.1      | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                                                 | 1 kebijakan | 1 kebijakan | 84.635.000         | 84.635.000         |
| II.1.2      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                       | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG      | 42 orang    | 42 orang    | 41.552.000         | 31.978.000         |

|             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                    |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>II.2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>         | <b>Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi</b>                                                                             | <b>20 organisasi</b> | <b>20 organisasi</b> | <b>54.542.000</b>  | <b>44.381.000</b>  |
| II.2.1      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 20 lembaga           | 20 lembaga           | 54.542.000         | 44.381.000         |
| <b>II.3</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                            | <b>Jumlah Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                                                                           | <b>7 Lembaga</b>     | <b>7 lembaga</b>     | <b>48.150.000</b>  | <b>13.500.000</b>  |
| II.3.1      | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                             | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi                                                           | 60 orang             | 20 orang             | 48.150.000         | 13.500.000         |
| <b>III</b>  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                            | <b>Persentase perlindungan Perempuan yang diintervensi</b>                                                                                                                                             | <b>60%</b>           | <b>50%</b>           | <b>774.727.220</b> | <b>517.681.520</b> |
| III.1       | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Perangkat Daerah/ Lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                                                             | 65                   | 50                   | 50.847.500         | 50.847.500         |

|              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |           |           |                    |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| III.1.1      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 2 dokumen | 2 dokumen | 50.847.500         | 50.847.500         |
| <b>III.2</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                               | <b>Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                             | <b>29</b> | <b>20</b> | <b>357.109.700</b> | <b>141.019.500</b> |
| III.2.1      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas            | 20 orang  | 20 orang  | 34.508.750         | 34.508.750         |
| III.3        | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                           | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                              | 300 orang | 250 orang | 188.977.050        | 106.510.750        |
| III.3.1      | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | 2 dokumen | 0         | 133.623.900        | -                  |



|              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |             |             |                    |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>III.3</b> | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan</b>                                                            | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>366.770.020</b> | <b>325.814.520</b> |
| III.3.1      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 360 orang   | 360 orang   | 249.030.020        | 208.074.520        |
| III.3.2      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi   | 70 layanan  | 70 layanan  | 117.740.000        | 117.740.000        |
| <b>IV</b>    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                        | <b>Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 penduduk anak)</b>                                                                          | <b>2,8</b>  | <b>2,9</b>  | <b>202.903.750</b> | <b>202.903.750</b> |
| <b>IV.1</b>  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Persentase perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap Anak</b>                                        | <b>75%</b>  | <b>50%</b>  | <b>50.655.000</b>  | <b>50.655.000</b>  |
| IV.1.1       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                  | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 50.655.000         | 50.655.000         |

|             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |             |                    |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| IV.1.2      | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | -           | -           | -                  | -                  |
| <b>IV.2</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                            | <b>29</b>   | <b>20</b>   | <b>34.508.750</b>  | <b>34.508.750</b>  |
| IV.2.1      | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                      | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                     | 2 kegiatan  | -           | -                  | -                  |
| IV.2.2      | Pengembangan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                  | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                      | 2 KIE       | -           | -                  | -                  |
| IV.2.3      | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan                                                               | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi             | 20 orang    | 20 orang    | 34.508.750         | 34.508.750         |
| <b>IV.3</b> | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                        | <b>Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan kewenangan Provinsi</b>                                                                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>117.740.000</b> | <b>117.740.000</b> |

|            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                    |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| IV.3.1     | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                          | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi                                                                                                 | 200 orang           | 200 orang           | 117.740.000        | 117.740.000        |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                          | <b>Persentase Kluster Hak Anak diintervensi</b>                                                                                                                    | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>228.715.000</b> | <b>152.557.000</b> |
| <b>V.1</b> | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                                                 | Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pelembagaan PHA                                                                 | 100%                | 100%                | 27.364.000         | 1.792.000          |
| V.1.1      | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 26 perangkat daerah | 10 perangkat daerah | 27.364.000         | 1.792.000          |
| <b>V.2</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                   | <b>Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan.</b>                                                                 | 100%                | 100%                | <b>201.351.000</b> | <b>150.765.000</b> |
| V.2.1      | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                           | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                           | 500 orang           | 430 orang           | 161629000          | 140.629.000        |

|              |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                            |                            |                   |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| V.2.2        | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota  | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 3 kegiatan                 | 1 kegiatan                 | 39.722.000        | 10.136.000        |
| <b>VI</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                      | <b>Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak</b>                                                         | <b>42 Perangkat Daerah</b> | <b>42 Perangkat Daerah</b> | <b>67.312.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>VI.1</b>  | <b>Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>Tersedianya Data gender dan Anak yang valid</b>                                                                                | <b>1 Dokumen</b>           | <b>1 Dokumen</b>           | <b>67.312.000</b> | <b>0</b>          |
| VI.1.1       | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                    | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                        | 1 dokumen                  | 1 dokumen                  | 24.382.000        | -                 |
| VI.1.2       | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                              | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                     | 1 dokumen                  | -                          | 42.930.000        | -                 |
| <b>VII</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                | <b>Indeks Kualitas Keluarga</b>                                                                                                   | <b>76.29</b>               | <b>76.29</b>               | <b>84.952.506</b> | <b>84.952.506</b> |
| <b>VII.1</b> | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>               | <b>Jumlah Lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan Hak Anak</b>                 | <b>7 Lembaga</b>           | <b>7 lembaga</b>           | <b>84.952.506</b> | <b>84.952.506</b> |
| VII.1.1      | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                     | 1 dokumen                  | 1 dokumen                  | 84.952.506        | 84.952.506        |

| <b>VIII</b>   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                            | <b>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</b>                                                                                                                                                         | <b>59,65</b>     | <b>59,65</b>     | <b>230.426.550</b> | <b>115.756.000</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VIII.1</b> | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>                      | <b>Indeks Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                                                        | <b>54</b>        | <b>54</b>        | <b>185.401.000</b> | <b>86.861.000</b>  |
| VIII.1.1      | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                        | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                          | 2 dokumen        | 1 dokumen        | 33.000.000         | 11.000.000         |
| VIII.1.2      | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain                    | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | 4 daerah         | 3 daerah         | 57.801.000         | 55.101.000         |
|               | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                                   | 7 laporan        | 3 laporan        | 94.600.000         | 20.760.000         |
| <b>VIII.2</b> | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>                                                                                         | <b>Jumlah Dokumen pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                                                   | <b>2 dokumen</b> | <b>1 dokumen</b> | <b>45.025.550</b>  | <b>28.895.000</b>  |

|             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |           |                    |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|
| VIII.2.1    | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                           | Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                       | 2 dokumen    | 1 dokumen | 45.025.550         | 28.895.000        |
| <b>IX</b>   | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                                              | <b>Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)</b>                                                                                                                                                      |              |           | <b>245.061.200</b> | <b>35.415.000</b> |
| <b>IX.1</b> | <b>Pengembangan Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | <b>Jumlah stakeholder dan mitra yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana</b>                                                                                                             |              |           | <b>138.401.200</b> | <b>35.415.000</b> |
| IX.1.1      | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                            | -            | -         | -                  | -                 |
| IX.1.2      | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                                                   | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 1 fasilitasi | -         | 17.775.200         | -                 |

|             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                    |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|
| IX.1.3      | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal        | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | -             | -        | -                  | -                 |
| IX.1.4      | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                                                   | 7 daerah      | 3 daerah | 120.626.000        | 35.415.000        |
| <b>IX.2</b> | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | <b>Jumlah organisasi masyarakat yang dibina dan berperan aktif dalam pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</b>                                                                                                     |               |          | <b>106.660.000</b> | <b>-</b>          |
| IX.2.1      | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                                                   | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                           | 20 organisasi | -        | 106.660.000        | -                 |
| <b>X</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                          | <b>Angka Kelahiran pada Usia 15-19 Tahun ASFR 15-19</b>                                                                                                                                                                            |               |          | <b>127.038.000</b> | <b>23.600.000</b> |

|            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |            |   |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>X.1</b> | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                           | <b>Jumlah organisasi dan kelompok keluarga yang memperoleh pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b> |            |   | <b>82.350.000</b> | <b>0</b>          |
| X.1.1      | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                                     | Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                   | -          | - | -                 | -                 |
| X.1.2      | Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                        | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                    | 3 dokumen  | - | 39.670.000        | -                 |
| X.1.3      | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                         | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana               | 5 kelompok | - | 42.680.000        | -                 |
| X.1.4      | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                                                                              | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja    | -          | - | -                 | -                 |
| <b>X.2</b> | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>        |            |   | <b>44.688.000</b> | <b>23.600.000</b> |



|       |                                                                                          |                                                                                                       |           |           |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| X.2.1 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 1 dokumen | 1 dokumen | 15.081.000 | 13.731.000 |
| X.2.2 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                | 5 laporan | 1 laporan | 29.607.000 | 9.869.000  |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti bencana.

Proses penyusunan rencana kerja perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi dan capaian kinerja pada triwulan 2 Tahun 2024 dan target hingga akhir tahun 2024 yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Medan, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA



SRI SURIANI PURNAMAWATI, S.Si, Apt, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196712071997032001